



BUPATI KETAPANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI KETAPANG
NOMOR 8 TAHUN 2022

TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH DAERAH DAN
PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KETAPANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan pelaksanaan pemerintahan yang lebih baik, bersih dan akuntabel sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai visi, misi dan tujuan Pemerintah Daerah Kabupaten Ketapang, perlu dikembangkan dan diterapkan sistem pertanggungjawaban kinerja yang jelas, terukur dan efektif melalui penetapan Indikator Kinerja Utama;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, mengamanatkan kewajiban Pemerintah Daerah untuk menetapkan Indikator Kinerja Utama;
- c. bahwa dengan diundangkannya Peraturan Daerah Kabupaten Ketapang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2021-2026, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah yang diarahkan untuk mewujudkan Visi dan Misi Pembangunan Daerah periode 2021-2026;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah Tahun 2021-2026;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoneisa Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoneisa Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoneisa Nomor 6516);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
13. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
14. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
15. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
17. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Nomor 59) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2020 Nomor 15);
18. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Nomor 95);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH DAERAH DAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021-2026.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Ketapang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Ketapang.
3. Bupati adalah Bupati Ketapang.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Ketapang.
5. Inspektur adalah Inspektur Kabupaten Ketapang.
6. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan PD adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun.
8. Sasaran strategis adalah penjabaran lebih lanjut dari tujuan yang dirumuskan secara spesifik dan terukur untuk dapat dicapai dalam kurun waktu lebih pendek dari tujuan.

9. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh PD atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh PD untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran sebagian atau seluruhnya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
10. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa PD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program, terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumberdaya berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut.
11. Keluaran (*output*) adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran strategis dan tujuan program dan kebijakan.
12. Hasil (*outcome*) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program mengacu pada sasaran strategis dan tujuan yang telah ditetapkan.
13. Indikator Kinerja Utama (*Key Performance Indicator*) yang selanjutnya disingkat dengan IKU adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi.
14. IKU Pemerintah Daerah adalah Ukuran keberhasilan dari suatu tujuan sasaran strategis Pemerintahan Daerah.
15. IKU PD adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis PD.
16. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat dengan RPJMD adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Ketapang.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Maksud IKU adalah :

- a. untuk mengukur kinerja Pemerintah Daerah dan semua PD secara lebih baik; dan
- b. untuk mengukur akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah dan semua PD agar mendapatkan hasil yang baik.

Pasal 3

Tujuan penetapan IKU adalah :

- c. untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik; dan
- d. untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis Pemerintah Daerah dan PD yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Pasal 4

Ruang lingkup IKU terdiri dari :

- a. IKU Pemerintah Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini; dan
- b. IKU PD sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah wajib menyusun IKU Pemerintah Daerah.
- (2) Setiap PD wajib menyusun IKU PD.
- (3) Format IKU PD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.

BAB III DASAR KEGUNAAN IKU

Pasal 6

IKU merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Pemerintah Daerah dan PD di lingkungan Pemerintah Daerah untuk :

- a. penyusunan perencanaan jangka menengah;
- b. penyusunan perencanaan tahunan dan anggaran;
- c. penyusunan dokumen penetapan kinerja;
- d. pengukuran kinerja;
- e. penyusunan pelaporan akuntabilitas kinerja;
- f. evaluasi capaian kinerja instansi pemerintah; dan
- g. pemantauan dan pengendalian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan.

BAB IV PENETAPAN IKU

Pasal 7

- (1) Penetapan IKU Pemerintah Daerah mengacu pada RPJMD Kabupaten Ketapang Tahun 2021-2026.
- (2) Penetapan IKU masing-masing PD mengacu pada IKU Pemerintah Daerah dan Rencana Strategis PD Tahun 2021-2026 dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) IKU pada setiap tingkatan unit organisasi meliputi indikator kinerja keluaran (*output*) dan hasil (*outcome*) dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. IKU Pemerintah Daerah paling sedikit memuat Indikator hasil (*outcome*); dan
 - b. IKU PD paling sedikit memuat indikator keluaran (*output*) sesuai dengan urusan, fungsi dan tugas.
- (4) Penetapan IKU sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dan ayat (2) juga mempertimbangkan beberapa hal yaitu :
 - a. kebutuhan informasi kinerja untuk penyelenggaraan akuntabilitas kinerja;
 - b. kebutuhan data statistik Pemerintah; dan
 - c. kelaziman pada bidang tertentu dan perkembangan Ilmu Pengetahuan.

BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 8

- (1) Pembinaan atas pelaksanaan Peraturan Bupati ini dilakukan oleh Sekretaris Daerah.
- (2) Pengawasan atas pelaksanaan Peraturan Bupati ini dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah yang melaksanakan fungsi pengawasan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Ketapang Nomor 73 Tahun 2016 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Ketapang Tahun 2016-2021 (Berita Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2016 Nomor 73) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Ketapang Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Ketapang Nomor 73 Tahun 2016 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Ketapang Tahun 2016-2021 (Berita Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2020 Nomor 8) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ketapang.

Ditetapkan di Ketapang
pada tanggal 18 Januari 2022

BUPATI KETAPANG,

ttd.

MARTIN RANTAN

Diundangkan di Ketapang
pada tanggal 18 Januari 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KETAPANG,

ttd.

ALEXANDER WILYO

BERITA DAERAH KABUPATEN KETAPANG TAHUN 2022 NOMOR 8

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kabupaten Ketapang,



H. MINTARIA, SH., MH
NIP. 19700703 199903 1 007

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI KETAPANG
 NOMOR 8 TAHUN 2022
 TENTANG
 INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH DAERAH
 DAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021-2026

INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2021-2026

Visi : Melanjutkan Ketapang Maju Menuju Masyarakat Sejahtera						
Misi 1 : Mewujudkan Pemerintahan yang Handal, Bersih, Terpercaya dan Berwibawa dalam Pelayanan Publik						
No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Formulasi/Rumus Perhitungan	Penanggung Jawab
1.	Terwujudnya reformasi birokrasi yang berkualitas	Indeks Reformasi Birokrasi (IRB)	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah	Nilai SAKIP	Nilai Hasil Evaluasi SAKIP Kemenpan RB	Sekretariat Daerah
				Nilai LPPD	Nilai Hasil Evaluasi LPPD Kementerian Dalam Negeri	Sekretariat Daerah
			Meningkatnya akuntabilitas keuangan daerah	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	Nilai Hasil Evaluasi IPKD dari Provinsi	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah; Badan Pendapatan Daerah
				Opini BPK	Audit Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Oleh BPK-RI	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah; Inspektorat Sekretariat Daerah
			Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Rata-rata Nilai IKM PD	Sekretariat Daerah
			Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik	Indeks SPBE	Indeks SPBE dari Kemenpan RB	Dinas Komunikasi dan Informatika
			Meningkatnya profesionalitas ASN	Indeks Profesionalitas Pegawai	Perka BKN No. 8 Tahun 2019 Tentang Pedoman Tata Cara dan Pelaksanaan Pengukuran IP ASN	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Misi 2 : Melanjutkan Peningkatan Pembangunan Infrastruktur						
No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Formulasi/Rumus Perhitungan	Penanggung Jawab
1.	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan	Indeks Infrastruktur Daerah	Meningkatnya akses dan kualitas jaringan jalan	Tingkat kemantapan jalan kabupaten	Jumlah panjang jalan dalam kondisi mantap / Jumlah total panjang jalan kabupaten x 100%	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
			Meningkatnya kualitas transportasi	Rasio konektivitas	Rasio konektivitas Kabupaten atau Kota = $(IK1 \times \text{bobot angkutan jalan}) + (IK2 \times \text{Bobot angkutan sungai, danau dan penyeberangan})$ x 100%	Dinas Perhubungan
			Meningkatnya akses terhadap pemukiman layak huni	Rasio rumah layak huni	Jumlah seluruh rumah layak huni disuatu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu / Jumlah rumah disuatu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
			Meningkatnya akses terhadap sanitasi layak dan berkelanjutan	Persentase Rumah Tangga yang memiliki akses terhadap sanitasi layak dan berkelanjutan	Jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik / Jumlah rumah tangga total x 100%	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
				Persentase Rumah Tangga yang memiliki akses terhadap air minum layak dan berkelanjutan	Jumlah rumah tangga dengan akses terhadap sumber air minum layak / Jumlah rumah tangga seluruhnya x 100%	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
				Meningkatnya kualitas tata ruang	Persentase pemanfaatan ruang sesuai dengan peruntukan	Luas pemanfaatan ruang yang sesuai peruntukkan / Luas total pemanfaatan x 100%
			Meningkatnya cakupan layanan irigasi	Persentase luas daerah irigasi kewenangan kabupaten yang dilayani jaringan irigasi	Jumlah luas daerah irigasi kewenangan kabupaten yang dilayani jaringan irigasi / Jumlah luas daerah irigasi kewenangan kabupaten x 100%	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang

Misi 2 : Melanjutkan Peningkatan Pembangunan Infrastruktur							
No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Formulasi/Rumus Perhitungan	Penanggung Jawab	
2.	Menurunnya risiko bencana	Indeks Risiko Bencana	Meningkatnya upaya mitigasi dan penanggulangan bencana	Angka korban bencana	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang; Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
Misi 3 : Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Memiliki Daya Saing							
No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Formulasi/Rumus Perhitungan	Penanggung Jawab	
1.	Terwujudnya peningkatan derajat pendidikan, kesehatan dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Indeks Pembangunan Manusia	Meningkatnya akses dan kualitas pendidikan	Indeks Pendidikan	$I_{HLS} = \frac{HLS - HLS_{min}}{HLS_{maks} - HLS_{min}}$ $I_{RLS} = \frac{RLS - RLS_{min}}{RLS_{maks} - RLS_{min}}$ $I_{pendidikan} = \frac{I_{HLS} + I_{RLS}}{2}$	Dinas Pendidikan	
			Meningkatnya prestasi keolahragaan dan kualitas pemuda	Persentase peningkatan prestasi olahraga	Jumlah prestasi olahraga tahun n - Jumlah prestasi olahraga tahun n-1 / Jumlah prestasi olahraga tahun n-1	x 100%	Dinas Pemuda dan Olahraga
				Persentase peningkatan wirausaha muda	Survei mandiri		Dinas Pemuda dan Olahraga
			Meningkatnya kelestarian budaya	Persentase budaya benda dan tak benda yang dilestarikan	Jumlah budaya benda dan tak benda yang dilestarikan tahun n - Jumlah budaya benda dan tak benda yang dilestarikan tahun n-1 / Jumlah budaya benda dan tak benda tahun n-1	x 100%	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan

Misi 3 : Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Memiliki Daya Saing						
No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Formulasi/Rumus Perhitungan	Penanggung Jawab
			Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Angka Harapan Hidup	Idealnya Angka Harapan Hidup dihitung berdasarkan Angka Kematian menurut umur (<i>Age Spesific Death Rate / ASDR</i>) yang datanya diperoleh dari catatan registrasi kematian secara bertahun-tahun sehingga dimungkinkan dibuat tabel kematian	Dinas Kesehatan; RSUD dr. Agoesdjam
			Meningkatnya keberdayaan perempuan dan anak	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Dalam penghitungan Indeks Pembangunan Gender (IPG) ada tiga komponen penyusun IDG, yaitu : keterwakilan di parlemen, pengambilan keputusan dan distribusi pendapatan (inc des) $IDG = \frac{I(\text{Par}) + I(\text{DM}) + I(\text{inc-des})}{3}$	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan KB
			Meningkatnya kesejahteraan sosial	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	$\frac{\text{Jumlah PPKS tahun } n - \text{Jumlah PPKS tahun } n-1}{\text{Jumlah PPKS tahun } n-1} \times 100\%$	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan KB
Misi 4 : Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa yang Merata dan Berkeadilan						
No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Formulasi/Rumus Perhitungan	Penanggung Jawab
1.	Meningkatnya kemandirian desa	Indeks Desa Membangun	Meningkatnya keberdayaan desa	Desa Mandiri	IKS : Indeks Ketahanan Sosial IKE : Indeks Ketahanan Ekonomi IKL : Indeks Ketahanan Lingkungan $IDM = \frac{IKS + IKE + IKL}{3}$	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa; Kecamatan

Misi 5 : Memperkokoh Landasan Perekonomian Masyarakat						
No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Formulasi/Rumus Perhitungan	Penanggung Jawab
1.	Meningkatnya kualitas pertumbuhan ekonomi	Laju Pertumbuhan Ekonomi	Meningkatnya pertumbuhan sektor pertanian	Laju pertumbuhan sektor pertanian	$\frac{\text{PDRB sektor pertanian th. (n)} - \text{PDRB sektor pertanian th. (n-1)}}{\text{PDRB sektor pertanian th. (n-1)}} \times 100\%$ <p>PDRB sektor pertanian = PDRB sub sektor tanaman pangan (ADHK) + PDRB sub sektor hortikultura (ADHK) + PDRB sub sektor perkebunan (ADHK) + PDRB sub sektor peternakan (ADHK)</p> <p>ADHK = Atas Dasar Harga Konstan</p>	Dinas Pertanian, Peternakan dan Perkebunan
			Meningkatnya pertumbuhan sektor perikanan	Laju pertumbuhan sub-sektor perikanan	$\frac{n-(n-1)}{n-1} \times 100\%$ <p>Ket: n = realisasi PDRB sub sektor perikanan tahun berjalan</p>	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
			Meningkatnya realisasi penanaman modal	Persentase peningkatan realisasi PMDN/PMA	$\frac{\text{Jumlah investasi n} - \text{Jumlah investasi n - 1}}{\text{Jumlah investasi n - 1}} \times 100\%$	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
			Meningkatnya pertumbuhan sektor pariwisata	Laju pertumbuhan sektor akomodasi dan makan minum	Survei mandiri	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
			Meningkatnya pertumbuhan sektor perdagangan	Laju Pertumbuhan Sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	$\frac{\text{PDRB ADHK sub sektor perdagangan tahun (n)} - \text{PDRB ADHK sub sektor perdagangan tahun (n-1)}}{\text{PDRB ADHK sub sektor perdagangan tahun (n-1)}} \times 100\%$	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian

Misi 5 : Memperkokoh Landasan Perekonomian Masyarakat						
No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Formulasi/Rumus Perhitungan	Penanggung Jawab
			Meningkatnya pertumbuhan sektor perindustrian	Laju pertumbuhan sektor industri pengolahan	$\frac{\text{PDRB ADHK sektor industri pengolahan tahun (n)} - \text{PDRB ADHK sektor industri pengolahan tahun (n-1)}}{\text{PDRB ADHK sektor industri pengolahan tahun (n-1)}} \times 100\%$	
		Laju Inflasi	Meningkatnya kedaulatan pangan	Indeks Ketahanan Pangan	$\bar{X} = \frac{\sum_{i=1}^3 \bar{X}_i}{3}$ <p>dengan: \bar{X} = rata-rata skor untuk masing-masing dimensi dimana i menunjukkan dimensi. (rentang nilainya $0 \leq \bar{X} \leq 23$ atau dalam bentuk persentase $0\% \leq \bar{X} \leq 100\%$)</p>	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
2.	Meningkatnya pemerataan kesejahteraan	Indeks Gini	Meningkatnya kontribusi sektor koperasi dan usaha kecil menengah terhadap perekonomian	Persentase koperasi yang SHU-nya meningkat	Jumlah Koperasi yang SHU nya Meningkat / Jumlah Seluruh Koperasi x 100%	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian
				Persentase peningkatan kelas usaha mikro ke kecil	Jumlah Usaha Mikro yang Naik Kelas ke Usaha Kecil / Jumlah Seluruh Usaha Mikro x 100%	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian
		Tingkat Kemiskinan	Menurunnya pengangguran	Tingkat Pengangguran Terbuka	$f(x) = a/b \times 100\%$ a : Jumlah Pengangguran b : Jumlah Angkatan Kerja	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Misi 6 : Pengelolaan dan Pemanfaatan Sumber Daya Alam untuk Kesejahteraan Seluruh Masyarakat Ketapang						
No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Formulasi/Rumus Perhitungan	Penanggung Jawab
1.	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Meningkatnya kualitas air	Indeks Kualitas Air (IKA)	Menggunakan Aplikasi IKLH	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
			Meningkatnya kualitas udara	Indeks Kualitas Udara (IKU)	$IKU = 100 - \left(\frac{50}{0,9} (I_{EU} - 0,1) \right)$	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup

Misi 6 : Pengelolaan dan Pemanfaatan Sumber Daya Alam untuk Kesejahteraan Seluruh Masyarakat Ketapang						
No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Formulasi/Rumus Perhitungan	Penanggung Jawab
			Meningkatnya kualitas tutupan lahan	Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)	$IKLT = 100 - ((84,3 - (TL \times 100)) \times 50/54,3)$	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
Misi 6 : Pengelolaan dan Pemanfaatan Sumber Daya Alam untuk Kesejahteraan Seluruh Masyarakat Ketapang						
No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Formulasi/Rumus Perhitungan	Penanggung Jawab
			Meningkatnya pengelolaan persampahan	Persentase sampah tertangani	Total volume sampah yang dapat ditangani / Total volume timbunan sampah x 100%	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
				Persentase sampah berkurang	Total volume sampah yang berkurang / Total volume timbunan sampah x 100%	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
2.	Meningkatnya pemanfaatan SDA untuk kesejahteraan masyarakat	Tingkat Kemiskinan	Meningkatnya kualitas pemanfaatan SDA terhadap perekonomian	Persentase penerima manfaat industri ekstraktif dalam bentuk CSR	Jumlah Desa Penerima Manfaat CSR Tahun n / Jumlah Total Desa x 100%	Sekretariat Daerah
				Persentase serapan tenaga kerja dalam industri ekstraktif	Survei mandiri	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

BUPATI KETAPANG,

ttd.

MARTIN RANTAN

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kabupaten Ketapang,



H. MINTARIA, SH., MH
NIP. 19700703 199903 1 007

LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI KETAPANG
 NOMOR 8 TAHUN 2022
 TENTANG
 INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH DAERAH
 DAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021-2026

INDIKATOR KINERJA UTAMA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021-2026

No	Perangkat Daerah	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan/Formulasi Hitungan	Penganggung Jawab
1.	Sekretariat Daerah	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)	Nilai Hasil Evaluasi LPPD Kementerian Dalam Negeri	Sekretariat Daerah
			Persentase PD Dengan Nilai RB Minimal B	PD Dengan Nilai RB Minimal / Dengan Jumlah Seluruh PD x 100%	Sekretariat Daerah
		Terjaganya stabilitas Harga Kebutuhan Pokok	Tingkat Inflasi	$\text{Inflasi}_n = \frac{\text{IHK}_n - \text{IHK}_{(n-1)}}{\text{IHK}_{(n-1)}} \times 100$ <p>dengan: Inflasi_n = Inflasi pada periode ke-n IHK_n = Indeks harga Konsumen (IHK) pada periode ke-n IHK_{n-1} = Indeks harga Konsumen (IHK) pada periode ke-n-1</p>	Sekretariat Daerah
	Meningkatkan Kualitas Kerjasama Pembangunan Bidang Ekonomi	Persentase Peningkatan Penerimaan Manfaat Industri Ekstraktif dalam Bentuk CSR	Jumlah Desa Penerima Manfaat CSR Tahun n / Jumlah Total Desa x 100%	Sekretariat Daerah	
2.	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase pengelolaan keuangan daerah sesuai standar	Jumlah Dokumen Pertanggungjawaban Laporan Keuangan / Jumlah PD x 100%	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
		Meningkatnya kualitas Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase pengelolaan aset sesuai standar	Jumlah Realisasi Sertifikasi Tanah Milik Pemerintah Kabupaten Ketapang Tahun Berjalan dibagi Target Sertifikasi Tanah Tahun Berjalan x 100%	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

No	Perangkat Daerah	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan/Formulasi Hitungan	Penganggung Jawab
3.	Badan Pendapatan Daerah	Meningkatnya Penerimaan Pendapatan Asli Daerah	Persentase Penerimaan Pendapatan Asli Daerah terhadap APBD	Jumlah PAD / Total Pendapatan Daerah x 100%	Badan Pendapatan Daerah
4.	Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah	Konsistennya Keterpaduan antara Dokumen Perencanaan	Persentase Keterpaduan antara Dokumen Perencanaan	Jumlah Program dalam RKPD / Jumlah Program dalam RPJMD x 100%	Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah
				Jumlah Program dalam Renja-PD / Jumlah Program dalam RKPD x 100%	
		Meningkatnya Ketercapaian Sasaran Daerah	Persentase Ketercapaian Sasaran Daerah	Realisasi Program PD / Target Program PD x 100%	Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah
5.	Inspektorat	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Organisasi Pemerintah Daerah	Persentase PD dengan Nilai SAKIP minimal B	Jumlah PD dengan nilai SAKIP minimal B / Jumlah PD yang dievaluasi x 100%	Inspektorat
		Meningkatnya kualitas pengawasan internal	Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi	Hasil <i>Quality Assurance</i> BPKP	Inspektorat
		Meningkatnya tindak lanjut temuan hasil pemeriksa	Persentase penyelesaian TLHP	Persentase rekomendasi yang ditindaklanjuti (ITKAB, ITPROV dan BPK) / Jumlah total rekomendasi x 100%	Inspektorat
6.	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Meningkatnya Profesionalisme ASN	Indeks Profesionalitas Pegawai	Jumlah nilai indeks profesionalisme ASN seluruh Pejabat Struktural	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
7.	Badan Penelitian dan Pengembangan	Meningkatnya kajian dan analisis untuk kebijakan pembangunan daerah	Persentase pemanfaatan hasil Litbang	Jumlah Kelitbangan yang ditindaklanjuti / Jumlah Kelitbangan dalam Renja-PD x 100%	Badan Penelitian dan Pengembangan
8.	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	Meningkatnya kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan	Rata-rata kepemilikan dokumen kependudukan	Σ Masyarakat yang memiliki Dokumen Kependudukan / Σ Total Masyarakat yang wajib Dokumen Kependudukan x 100%	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
			Rata-rata kepemilikan dokumen catatan sipil	Σ Masyarakat yang memiliki Dokumen Catatan Sipil / Σ Total Masyarakat yang wajib Dokumen Catatan Sipil x 100%	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
			Persentase PD yang memanfaatkan dokumen kependudukan	Jumlah PD yang Telah Memanfaatkan Data Kependudukan Berdasarkan Perjanjian Kerja Sama / Jumlah PD x 100%	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

No	Perangkat Daerah	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan/Formulasi Hitungan	Penganggung Jawab
9.	Dinas Komunikasi dan Informatika	Terintegrasinya jaringan antar PD dan Pengelolaan Domain Pemerintah Daerah	Presentase Integrasi jaringan antar PD dan Pengelolaan Domain Pemerintah Daerah	Jumlah Aplikasi / Jumlah Aplikasi yang terintegrasi x 100%	Dinas Komunikasi dan Informatika
		Meningkatnya keterbukaan informasi terhadap publik	indek keterbukaan informasi Publik	Bobot Nilai dari 4 Indikator : mengumumkan informasi publik, menyediakan informasi publik, pelayanan informasi publik dan pengelolaan informasi dan dokumentasi informasi publik	Dinas Komunikasi dan Informatika
		Meningkatnya pemanfaatan data statistik sektoral	Persentase PD yang memanfaatkan data statistik sektoral dalam pembangunan daerah	Jumlah PD yang Menggunakan Data Statistik Dalam Pembangunan Daerah / Jumlah PD x 100%	Dinas Komunikasi dan Informatika
		Meningkatnya keamanan informasi	Indeks KAMI	Hasil <i>Assessment</i> Indeks Keamanan Informasi (Indeks KAMI) oleh BSSN	Dinas Komunikasi dan Informatika
10.	Sekretariat DPRD	Meningkatnya Dukungan DPRD terhadap Peran DPRD sesuai Tugas dan Fungsinya	IKM Sekretariat DPRD	Nilai Unsur (Nilai Rata-Rata Pelayanan) / NRR per Unsur (Nilai Kuisisioner yang terisi) dibagi NRR Tertimbang x 25%	Sekretariat DPRD
11.	Kecamatan	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	IKM Kecamatan	Nilai Unsur (Nilai Rata-Rata Pelayanan) / NRR per Unsur (Nilai Kuisisioner yang terisi) dibagi NRR Tertimbang x 25%	Kecamatan
12.	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	Meningkatnya akses dan kualitas jaringan jalan	Tingkat kemantapan jalan kabupaten	Jumlah panjang jalan dalam kondisi mantap / Jumlah total panjang jalan kabupaten) x 100%	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
		Meningkatnya akses terhadap pemukiman layak huni	Persentase Rumah Tangga yang memiliki akses terhadap sanitasi layak dan berkelanjutan	Jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik / Jumlah rumah tangga total x 100%	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
		Meningkatnya akses terhadap pemukiman layak huni	Persentase Rumah Tangga yang memiliki akses terhadap air minum layak dan berkelanjutan	Jumlah rumah tangga dengan akses terhadap sumber air minum layak / Jumlah rumah tangga seluruhnya x 100%	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
		Meningkatnya kualitas tata ruang	Persentase pemanfaatan ruang sesuai dengan peruntukan	Luas pemanfaatan ruang yang sesuai peruntukkan / Luas total pemanfaatan x 100%	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang

No	Perangkat Daerah	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan/Formulasi Hitungan	Penganggung Jawab
		Meningkatnya cakupan layanan irigasi	Persentase luas daerah irigasi kewenangan kabupaten yang dilayani jaringan irigasi	$\frac{\text{Jumlah luas daerah irigasi kewenangan kabupaten yang dilayani jaringan irigasi}}{\text{Jumlah luas daerah irigasi kewenangan kabupaten}} \times 100\%$	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
		Meningkatnya upaya mitigasi dan penanggulangan bencana	Rasio luas kawasan permukiman sepanjang daerah rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindung oleh infrastruktur pengaman	Persentase daerah rawan yang memiliki pengendali abrasi pantai + Persentase Daerah Rawan Longsor Yang Memiliki Tembok Penahan Memadai + Persentase Daerah Pertanian Yang Telah Memiliki Tanggul Penahan Air Asin Memadai + Persentase Daerah Rawan Kebakaran Lahan Yang memiliki Irigasi Sekat-Sekat Bakar Memadai + Persentase Drainase Dalam Kondisi Baik	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
13.	Dinas Perhubungan	Meningkatnya kualitas transportasi	Rasio konektivitas	$\frac{\text{Rasio konektivitas Kabupaten atau Kota}}{(\text{IK1} \times \text{bobot angkutan jalan}) + (\text{IK2} \times \text{Bobot angkutan sungai, danau dan penyeberangan})} \times 100\%$	Dinas Perhubungan
14.	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	Meningkatnya akses terhadap pemukiman layak huni	Rasio rumah layak huni	Jumlah seluruh rumah layak huni disuatu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu / Jumlah rumah disuatu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup
		Meningkatnya kualitas air	Indeks Kualitas Air (IKA)	Menjumlahkan hasil perkalian persentase setiap status mutu dengan bobotnya	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup
		Meningkatnya kualitas udara	Indeks Kualitas Udara (IKU)	$IKU = 100 - \left(\frac{50}{0,9} (I_{EU} - 0,1) \right)$	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup
		Meningkatnya kualitas tutupan lahan	Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)	$IKTL = 100 - ((84,3 - (TL \times 100)) \times 50 / 54,3)$	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup

No	Perangkat Daerah	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan/Formulasi Hitungan	Penganggung Jawab
		Meningkatnya pengelolaan persampahan	Persentase sampah tertangani	Total volume sampah yang dapat ditangani / Total volume timbunan sampah x 100%	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup
			Persentase sampah berkurang	Total volume sampah yang berkurang / Total volume timbunan sampah x 100%	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup
15.	Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan	Meningkatnya produksi tanaman pangan	Produksi Tanaman Pangan Jumlah produksi - Padi (ton) - Jagung (ton) - Kedelai (ton) - Ubi Kayu (ton)	Luas panen (ton) x Produktivitas (ton/ha)	Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan
		Meningkatnya produksi tanaman hortikultura	Produksi tanaman hortikultura Jumlah produksi - Sayuran semusim - Buah-buahan tahunan	Luas panen (ton) x Produktivitas (ton/ha)	Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan
		Meningkatnya produksi tanaman perkebunan	Produksi tanaman perkebunan Jumlah produksi - Karet - Kelapa - Kopi - Kelapa Sawit PBS - Kelapa Sawit Rakyat - Lada	Luas panen (ton) x Produktivitas (ton/ha)	Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan
		Meningkatnya kualitas produk pertanian	Persentase produk pertanian bersertifikat - Produk Tanaman Pangan - Produk Tanaman Hortikultura	Jumlah produk pertanian bersertifikat / Total produk pertanian x 100%	Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan

No	Perangkat Daerah	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan/Formulasi Hitungan	Penganggung Jawab
			- Produk Tanaman Perkebunan		
		Meningkatnya produksi hasil peternakan	Produksi hasil ternak - Daging Ternak Besar - Daging Ternak Kecil - Daging Ternak Unggas - Telur	Luas panen (ton) x produktivitas (ton/ha)	Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan
		Meningkatnya populasi ternak	Populasi ternak - Daging Ternak Besar - Daging Ternak Kecil - Daging Ternak Unggas	Populasi ternak tahun ini + Populasi ternak tahun lalu	Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan
16.	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	Meningkatnya Produksi Perikanan Tangkap	Produksi perikanan tangka	Jumlah produksi perikanan Tangkap (ton) dibagi Target daerah dikali 100	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
		Meningkatnya Produksi Perikanan Budidaya	Produksi perikanan Budidaya	Jumlah produksi perikanan budidaya (ton) dibagi Target daerah dikali 100	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
		Meningkatnya Kualitas Produk perikanan	Persentase produk perikanan yang bersertifikat	Jumlah produk olahan perikanan yang bersertifikat dibagi Total produk olahan perikanan dikali 100	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
		Meningkatnya ketahanan pangan	Persentase ketersediaan pangan / Indeks ketersediaan	Hasil penilaian Kementerian Pertanian	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
			Indeks keterjangkauan	Hasil penilaian Kementerian Pertanian	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
			Indeks pemanfaatan	Hasil penilaian Kementerian Pertanian	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
17.	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian	Meningkatnya Koperasi yang Berkualitas	Persentase Peningkatan Koperasi yang Berkualitas	Perbandingan koperasi sehat / Koperasi Aktif x 100%	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian
		Meningkatnya Usaha Mikro menjadi Kecil dan Menengah	Persentase Peningkatan Omzet Usaha Menengah, Kecil dan Mikro	Omzet UMKM tahun ini / Omzet UMKM tahun lalu x 100%	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian
		Optimalnya Nilai Perdagangan	Nilai perdagangan	Nilai perdagangan tahun ini / Nilai perdagangan tahun lalu x 100%	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian

No	Perangkat Daerah	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan/Formulasi Hitungan	Penganggung Jawab
		Meningkatnya Kelancaran Distribusi Barang	Tingkat kelancaran distribusi barang	Survei mandiri	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian
		Meningkatnya Nilai Produksi IKM	Persentase Peningkatan Nilai Produksi IKM	$(\text{Nilai Produksi IKM tahun ini} / \text{Nilai Produksi IKM tahun lalu}) - 1 \times 100\%$	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian
18.	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	Peningkatan daya tarik masyarakat terhadap warisan budaya	Persentase budaya benda dan tak benda yang dilestarikan	$\text{Jumlah budaya benda dan tak benda yang dilestarikan} / \text{Jumlah seluruh budaya benda dan tak benda} \times 100\%$	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
		Meningkatnya kunjungan wisatawan	Persentase peningkatan wisatawan (dalam negeri dan mancanegara)	$\text{Jumlah wisman dan wisnu tahun ini} / \text{Jumlah wisman dan wisnu tahun lalu} \times 100\%$	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
19.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Meningkatnya Realisasi Penanaman Modal	Persentase Peningkatan Realisasi PMDN/ PMA	$\text{Jumlah investasi n} - \text{Jumlah investasi n-1} / \text{Jumlah investasi n-1} \times 100\%$	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		Meningkatnya Pelayanan Perizinan Sesuai Standar Pelayanan	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Perizinan	$\text{Jumlah Pelaku Usaha Yang Puas} / \text{Jumlah Pelaku Usaha Yang Dilayani} \times 100\%$	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
20.	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Meningkatnya wirausaha baru	Persentase peningkatan wirausaha baru	$\text{Jumlah wirausaha n} - \text{Jumlah wirausaha n-1} / \text{Jumlah wirausaha n-1} \times 100\%$	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
		Meningkatnya Kesempatan Kerja	Tingkat kesempatan kerja	$\text{Jumlah Pencari Kerja yang Ditempatkan} / \text{Jumlah Pencari Kerja} \times 100$	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
		Meningkatnya Penyelesaian Hubungan Industrial	Persentase perselisihan hubungan industrial yang terselesaikan	$\text{Jumlah Kasus yang Telah Diselesaikan dengan OB} / \text{Jumlah Kasus yang Terdaftar} \times 100$	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
		Meningkatnya Pengembangan Kawasan Transmigrasi dan Eks Transmigrasi	Persentase kawasan transmigrasi dan lokasi eks transmigrasi yang berkembang	$\text{Jumlah Kawasan Transmigrasi yang Dikembangkan} / \text{Jumlah Kawasan Transmigrasi dan Eks Transmigrasi} \times 100$	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
		Meningkatnya serapan tenaga kerja dalam industri ekstraktif	Persentase serapan tenaga kerja dalam industri ekstraktif	Survei mandiri	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

No	Perangkat Daerah	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan/Formulasi Hitungan	Penganggung Jawab
21.	Dinas Pendidikan	Meningkatnya akses dan kualitas pendidikan	Indeks Pendidikan	$I_{HLS} = \frac{HLS - HLS_{min}}{HLS_{maks} - HLS_{min}}$ $I_{RLS} = \frac{RLS - RLS_{min}}{RLS_{maks} - RLS_{min}}$ $I_{pendidikan} = \frac{I_{HLS} + I_{RLS}}{2}$	Dinas Pendidikan
22.	Dinas Kesehatan	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Angka Harapan Hidup	Idealnya Angka Harapan Hidup dihitung berdasarkan Angka Kematian menurut umur (Age Spesific Death Rate/ASDR) yang datanya diperoleh dari catatan registrasi kematian secara bertahun-tahun sehingga dimungkinkan dibuat tabel kematian	Dinas Kesehatan
23.	Dinas Pemuda dan Olahraga	Meningkatnya prestasi keolahragaan dan kualitas pemuda	Persentase peningkatan prestasi olahraga	(Jumlah prestasi olahraga tahun n - Jumlah prestasi olahraga tahun n-1 / Jumlah prestasi olahraga tahun n-1) x 100%	Dinas Pemuda dan Olahraga
		Meningkatnya kualitas kewirausahaan pemuda	Persentase peningkatan wirausahawan muda	(Jumlah UKM yang dikembangkan oleh pemuda tahun n - Jumlah UKM yang dikembangkan oleh pemuda tahun n-1 / Jumlah UKM yang dikembangkan oleh pemuda n-1) x 100%	Dinas Pemuda dan Olahraga
24.	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Kearsipan Sesuai Kaidah Kearsipan yang Efisien dan Efektif	Tingkat ketersediaan arsip	$T = \frac{(a + i + s + j)}{4}$ <p>T = Tingkat ketersediaan arsip a = Persentase arsip aktif yang telah dibuatkan daftar arsip i = Persentase arsip inaktif yang telah dibuatkan daftar arsip s = Persentase arsip statis yang telah dibuatkan sarana bantu temu balik j = Persentase jumlah arsip yang dimasukkan dalam SIKN melalui JIKN</p>	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah
		Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi Kearsipan dan	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Nilai Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat yang didapatkan dengan metode sensus dengan mengukur	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah

No	Perangkat Daerah	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan/Formulasi Hitungan	Penganggung Jawab
		Perpustakaan Kepada Masyarakat		sejumlah unsur pembangunan literasi masyarakat (UPLM) dan aspek masyarakat (AM) UPLM 1 = Pemerataan layanan perpustakaan UPLM 2 = Ketercukupan koleksi UPLM 3 = Ketercukupan tenaga perpustakaan UPLM 3 = Tingkat kunjungan masyarakat ke perpustakaan UPLM 5 = Perpustakaan ber-SNP UPLM 6 = Keterlibatan masyarakat dalam kegiatan perpustakaan UPLM 7 = Anggota perpustakaan Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat = $\sum_{ALM}^{UPLM} \times 100$	
25.	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan KB	Meningkatnya Kesejahteraan Sosial	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	$\frac{\text{Jumlah PPKS pada tahun (n-1) - Jumlah PPKS pada tahun (n)}}{\text{Jumlah PPKS pada tahun (n-1)}} \times 100\%$	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan KB
Meningkatnya Keberdayaan Perempuan dan Anak		Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Indikator Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) I(par)Indeks Keterwakilan di Parlemen, I(DM) Indeks Pengambilan Keputusan, dan I (inc-des) Indeks Distribusi Pendapatan. $IDG = \frac{I(\text{Par}) + I(\text{DM}) + I(\text{inc-des})}{3}$	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan KB	
Terkendalinya Pertumbuhan Penduduk		Total Fertility Rate (TFR)	$TFR = 5 \sum_{i=15-19}^{45-49} ASFR_i$ ASFR _i : ASFR untuk wanita pada kelompok usia ke-i i = kelompok usia 15-19, 20-24, ..., 45-49	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan KB	

No	Perangkat Daerah	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan/Formulasi Hitungan	Penganggung Jawab
26.	RSUD dr. Agoesdjam	Meningkatnya jangkauan dan mutu layanan rumah sakit	Akreditasi Rumah Sakit	Hasil penilaian Komisi Akreditasi Rumah Sakit (KARS)	RSUD dr. Agoesdjam
27.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa	Meningkatnya keberdayaan desa	Desa status mandiri	IKS : Indeks Ketahanan Sosial IKE : Indeks Ketahanan Ekonomi IKL : Indeks Ketahanan Lingkungan $IDM = \frac{IKS + IKE + IKL}{3}$	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
28.	Satuan Polisi Pamong Praja	Meningkatnya Keamanan dan ketertiban umum	Persentase penurunan pelanggaran K3	Jumlah pelaksanaan pengamanan dan penertiban / Jumlah kegiatan pengamanan dan penertiban x 100%	Satuan Polisi Pamong Praja
29.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Meningkatnya Partisipasi Politik Masyarakat	Persentase Partisipasi Politik Masyarakat	Jumlah Partisipasi Politik Masyarakat Meningkat / Total Tim Terpadu di kabupaten (20) x 100%	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		Meningkatnya Penanganan Potensi Konflik Sosial	Persentase Penurunan Potensi Konflik Sosial	Jumlah Penurunan Potensi Konflik Sosial / Total Jumlah LSM dan Ormas di Kabupaten x 100%	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
30.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Meningkatnya upaya mitigasi dan penanggulangan bencana	Angka Korban Bencana	Survei mandiri	Badan Penanggulangan Bencana Daerah

BUPATI KETAPANG,

ttd.

MARTIN RANTAN

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kabupaten Ketapang,



H. MINTARIA, SH., MH
NIP. 19700703 199903 1 007